



**RUMUSAN**  
**RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**  
**PERIODE I TAHUN 2019**

***Ruang Mayang Mangurai, Senin, 29 April 2019***

***Bismillahirrahmannirahiim...***

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

***Salam Sejahtera Bagi Kita Semua***

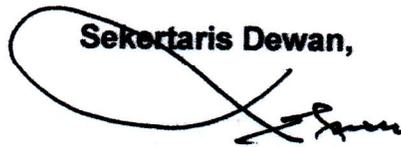
Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Ketua, dan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se Provinsi Jambi, serta Ketua, Anggota, Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Jambi dapat dirumuskan:

1. Kita pantas mensyukuri keberhasilan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jambi dimana berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) sudah tak satu wilayah kabupaten/kota pun di Provinsi Jambi yang masih terkategori Perioritas 1 dalam pembangunan ketahanan pangan.
2. Namun demikian, jika dilihat per indikator masih terdapat sejumlah wilayah kabupaten/kota yang masih berstatus Perioritas 1 dimana dari 9 indikator yang digunakan, masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang masih memiliki nilai sangat rendah pada sejumlah wilayah kabupaten/kota. Tiga indikator dominan perioritas 1 adalah: Kemiskinan, Stunting dan Pendidikan Wanita diatas usia 15 Tahun.
3. Sesuai dengan hasil pembangunan ketahanan pangan sebagaimana disajikan dalam Peta FSVA Tahun 2018, perlu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk menurunkan tingkat Kemiskinan dan Stunting di daerah terdampak dan membuka kesempatan bagi para wanita diatas usia 15 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, serta mendistribusikan Tenaga Para Medis ke seluruh wilayah pemukiman di Provinsi Jambi.
4. Guna lebih memperoleh hasil pembangunan ketahanan pangan yang lebih baik, maka Peta FSVA Tahun 2018 tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kewenangannya masing masing.

5. Guna mengetahui lokasi prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan yang lebih fokus maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat peta FSVA dengan cakupan tingkat desa/kelurahan. Perlu asistensi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi ke kabupaten/kota untuk dapat menyusun FSVA tingkat desa/kelurahan oleh Kabupaten/kota.
6. Dokumen FSVA perlu disosialisasikan kepada Pengambil Keputusan Pembangunan terutama DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Penanganan pembangunan ketahanan pangan dengan pendekatan 9 indikator tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetapi harus dilakukan secara bersinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian rumusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Sekretaris Dewan,**



**Ir. H. AMIR HASBI, ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640406 199303 1006